

BAB V

SIMPULAN, REKOMENDASI DAN PRODUK PENELITIAN

A. Simpulan Hasil Penelitian

1. Simpulan Umum

Proses pengelolaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan di Universitas Islam Bandung sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan/ standar pembiayaan yang berlaku.

2. Simpulan Khusus

- a) Perencanaan pembiayaan pendidikan di Universitas Islam Bandung dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tata kelola keuangan mencakup penetapan anggaran yang transparan dan efisien, keterlibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan, serta kesesuaian dengan visi dan misi universitas. Selain itu, kebijakan keuangan yang sistematis dan prediksi pendapatan serta pengeluaran yang akurat menjadi faktor penting dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional. Dengan perencanaan yang matang, Universitas Islam Bandung dapat mengelola keuangan secara lebih akuntabel, mendukung peningkatan mutu pendidikan, serta menjaga keberlanjutan institusi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- b) Pengorganisasian pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tata kelola keuangan di Universitas Islam Bandung meliputi pembentukan struktur organisasi yang jelas, koordinasi yang efektif antar unit, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, penerapan teknologi dalam sistem keuangan membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi, sementara peraturan internal yang ketat memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas. Dengan pengorganisasian yang baik, perguruan tinggi swasta dapat mengelola keuangan secara lebih

profesional, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mendukung peningkatan mutu pendidikan.

- c) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Universitas Islam Bandung dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tata kelola keuangan mencakup realisasi anggaran yang tepat sasaran, pengelolaan dana yang efisien, serta prosedur pengeluaran yang transparan dan sesuai dengan kebijakan institusi. Selain itu, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan dana, sementara pelaporan keuangan yang akurat dan terbuka menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas serta kepercayaan stakeholder. Dengan pelaksanaan yang sistematis dan berbasis prinsip good governance, Universitas Islam Bandung dapat memastikan keberlanjutan keuangan yang sehat serta peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
- d) Pengawasan pembiayaan pendidikan di Universitas Islam Bandung dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tata kelola keuangan mencakup audit internal yang rutin untuk menilai efektivitas pengelolaan dana, serta penerapan sistem pengendalian internal guna mencegah penyimpangan. Selain itu, pemantauan kinerja dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran, sementara kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar dalam menjamin transparansi dan legalitas keuangan. Pelaporan pengawasan yang sistematis juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas serta memberikan gambaran yang jelas kepada stakeholder mengenai kondisi keuangan universitas. Dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan profesional, Universitas Islam Bandung dapat menjaga stabilitas finansial dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
- e) Pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di Universitas Islam Bandung dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tata kelola keuangan mencakup penyusunan laporan keuangan yang transparan dan sesuai standar, serta akuntabilitas publik melalui keterbukaan informasi kepada stakeholder. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala untuk

mengukur efektivitas pengelolaan dana, sementara feedback dari stakeholder menjadi masukan penting dalam perbaikan sistem keuangan. Selain itu, tindak lanjut audit dijalankan untuk memastikan bahwa rekomendasi perbaikan diterapkan guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan sistem pertanggungjawaban yang kuat, Universitas Islam Bandung dapat menjaga kredibilitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan serta mutu pendidikan.

- f) Dari lima hambatan Proses pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tata kelola keuangan di Universitas Islam Bandung hambatan utama adalah kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian keuangan. Kurangnya sistem pengawasan yang efektif dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penggunaan dana, risiko kebocoran anggaran, serta rendahnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Tanpa mekanisme kontrol yang ketat, penyimpangan atau inefisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat terjadi, yang pada akhirnya berdampak pada kestabilan finansial dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem audit internal, pemantauan berkala, serta penerapan teknologi keuangan untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas tata kelola keuangan di universitas.
- g) Untuk mengatasi hambatan utama yakni kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian keuangan di Universitas Islam Bandung, diperlukan penguatan sistem audit internal, penerapan sistem pengendalian keuangan yang lebih ketat, serta pemanfaatan teknologi dalam manajemen keuangan. Audit internal yang berkala dapat memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi, sementara mekanisme pemantauan yang lebih efektif akan membantu mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan. Selain itu, integrasi sistem keuangan berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan serta pelaporan keuangan. Dengan langkah-langkah ini, tata

kelola keuangan universitas dapat lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mendukung peningkatan mutu pendidikan.

B. Rekomendasi

1. Bagi Manajemen Perguruan Tinggi direkomendasikan agar:
 - a) Peningkatan Efisiensi: Penelitian ini merekomendasikan penerapan strategi Proses pengelolaan yang lebih efektif untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya.
 - b) Penguatan Pengawasan: Perguruan tinggi disarankan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
 - c) Perencanaan Keuangan yang Lebih Baik: Penelitian ini memberikan panduan untuk menyusun perencanaan keuangan yang lebih realistis dan terukur.
2. Bagi Staf dan Fakultas Perguruan Tinggi disarankan agar:
 - a) Peningkatan Keterlibatan: Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik, disarankan agar perguruan tinggi melibatkan staf dan fakultas secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan. Partisipasi aktif ini akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap pengelolaan keuangan institusi.
 - b) Pelatihan dan Pengembangan: Penelitian ini menyarankan agar perguruan tinggi menyelenggarakan program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kapasitas staf dan fakultas dalam mengelola keuangan. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti perencanaan anggaran, analisis keuangan, dan pengendalian internal.
3. Bagi Pihak Eksternal (Pemangku Kepentingan dan Pemerintah) disarankan agar:
 - a) Panduan Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung tata kelola keuangan perguruan tinggi swasta.

- b) Evaluasi dan Pengawasan: Penelitian ini memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan efektivitas evaluasi dan pengawasan kinerja keuangan perguruan tinggi oleh pihak eksterna.
- 4. Bagi Mahasiswa dan Orang Tua disarankan agar:
 - a) Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik: Dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, mahasiswa dan orang tua akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap perguruan tinggi. Mereka akan lebih yakin bahwa biaya pendidikan yang mereka bayarkan digunakan dengan tepat dan efisien.
 - b) Stabilitas Biaya Pendidikan: Dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, perguruan tinggi dapat menjaga stabilitas biaya pendidikan, yang bermanfaat bagi mahasiswa dan orang tua dalam perencanaan keuangan mereka.
- 5. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan agar:
 - a) Peneliti selanjutnya dapat memilih lokus penelitian lebih dari satu agar hasil penelitian bisa dibandingkan antar lokus.
 - b) Peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori manajemen selain dari G. Terry agar lebih berkembang
 - c) Peneliti selanjutnya dapat mencari faktor lain yang terdampak oleh Proses pengelolaan pendidikan.

C. Produk Penelitian

1. Judul

“Model Hipotetik Proses pengelolaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan Di Perguruan Tinggi Swasta Islam Berlandaskan Kearifan Lokal 3M (*Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid*)”.

2. Rasional/Latar Belakang

Latar belakang dari Model Hipotetik Proses pengelolaan Pendidikan ini berfokus pada pentingnya peningkatan mutu akuntabilitas dalam

tatakelola keuangan di perguruan tinggi swasta Islam berlandaskan kearifan lokal. Perguruan tinggi swasta Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam menyebarkan pendidikan yang tidak hanya berbasis pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Oleh karena itu, sistem pembiayaan yang diterapkan harus dapat mendukung pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kearifan lokal 3 M (*Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid*).

Dalam konteks ini, pembiayaan pendidikan sering kali dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan dana yang tidak efektif, ketidaktransparanan dalam penggunaan dana, serta kesulitan dalam mempertanggungjawabkan anggaran secara akurat. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model yang dapat mengoptimalkan Proses pengelolaan, meningkatkan akuntabilitas, serta mengurangi potensi penyalahgunaan dana yang tidak sesuai kearifan lokal 3 M (*Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid*).

Model hipotetik Proses pengelolaan pendidikan ini didesain untuk mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal 3 M (*Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid*) dalam menjalankan kegiatan akademik dan operasional lembaga. Melalui pengelolaan yang berbasis pada prinsip akuntabilitas yang tinggi, model ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan, memastikan pengelolaan dana yang efisien, serta memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.

Selain itu, model ini juga mempertimbangkan keberlanjutan pembiayaan pendidikan yang mencakup sumber daya internal dan eksternal yang dapat mendukung kelangsungan operasional perguruan tinggi swasta Islam. Dengan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan tetapi juga pada nilai-nilai syariah dan kearifan lokal, model ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih sesuai dengan

karakteristik serta kebutuhan perguruan tinggi swasta Islam di Indonesia.

3. Tujuan Model

- a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan: Model ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana di perguruan tinggi swasta Islam dilakukan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,. Transparansi dalam penggunaan anggaran diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* terhadap lembaga pendidikan.
- b. Mengoptimalkan Sumber Pembiayaan Pendidikan: Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola sumber pembiayaan yang ada secara lebih efisien, baik itu dari dana internal maupun eksternal. Model ini bertujuan untuk menciptakan kestabilan finansial yang dapat mendukung keberlanjutan operasional perguruan tinggi swasta Islam.
- c. Mengintegrasikan Kearifan Lokal dalam Manajemen pembiayaan: Model ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip syariah dalam setiap aspek pengelolaan keuangan dan pendidikan. Selain itu, penerapan kearifan lokal diharapkan dapat meningkatkan relevansi dan keberterimaan model pembiayaan pendidikan oleh masyarakat setempat.
- d. Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Kualitas Pengelolaan Lembaga: Dengan adanya pengelolaan keuangan yang akuntabel, diharapkan kualitas pendidikan dan manajemen perguruan tinggi swasta Islam dapat meningkat. Hal ini akan berdampak positif terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan serta daya saing perguruan tinggi tersebut di tingkat nasional maupun internasional.

4. Landasan Model

Berikut adalah beberapa peraturan dan kebijakan terkait dengan tata kelola keuangan perguruan tinggi swasta di Indonesia:

- a. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.** Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk aspek keuangan dan pengelolaan perguruan tinggi

swasta.

- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.** Menjelaskan mengenai tata kelola dan pengelolaan keuangan di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
- c. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.** Mengatur mengenai sistem pendidikan nasional yang mencakup perguruan tinggi, termasuk aspek pendanaan dan pengelolaan keuangan.
- d. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.** Menetapkan standar nasional pendidikan tinggi, termasuk standar pengelolaan keuangan di perguruan tinggi.
- e. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.** Mengatur mengenai akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang mencakup aspek pengelolaan keuangan.
- f. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.** Mengganti Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 dan mengatur lebih lanjut tentang standar nasional pendidikan tinggi, termasuk pengelolaan keuangan.
- g. **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.** Menetapkan ketentuan mengenai akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang mencakup aspek pengelolaan keuangan.
- h. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).** Standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memastikan laporan keuangan perguruan tinggi swasta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

5. Persyaratan Model

Untuk memastikan Model Hipotetik Proses pengelolaan Pendidikan berjalan dengan efektif dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tatakelola keuangan di perguruan tinggi swasta Islam berlandaskan kearifan lokal, beberapa syarat berikut perlu dipenuhi:

- a. Komitmen terhadap Kearifan Lokal: Perguruan tinggi harus memiliki komitmen kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pengelolaan keuangan dan pendidikan. Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan masyarakat sekitar perlu diterapkan dalam sistem pembiayaan agar lebih diterima dan mencerminkan identitas budaya setempat.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Ketersediaan SDM yang terlatih dan memahami prinsip syariah serta akuntabilitas keuangan sangat penting. Dosen, tenaga administrasi, dan pengelola keuangan harus dilatih untuk memahami dan menerapkan pengelolaan pembiayaan yang berbasis pada akuntabilitas dan transparan.
- c. Sistem Keuangan yang Terstruktur dan Terintegrasi: Perguruan tinggi harus memiliki sistem informasi keuangan yang terstruktur dan terintegrasi untuk memonitor arus dana, laporan keuangan, dan pengeluaran. Sistem ini harus mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan.
- d. Pengawasan Internal dan Eksternal yang Efektif: Diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang baik baik dari internal (misalnya auditor internal atau badan pengawas) maupun eksternal (seperti lembaga audit independen atau regulator). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan sesuai dengan rencana dan prinsip syariah, serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan keuangan.
- e. Partisipasi Stakeholder yang Aktif: Keterlibatan berbagai pihak terkait, seperti dosen, mahasiswa, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat penting dalam proses perencanaan dan

evaluasi pembiayaan. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

- f. Peraturan dan Kebijakan yang Mendukung: Perguruan tinggi perlu memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan keuangan, yang mematuhi standar akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Hal ini juga termasuk peraturan yang mengatur penggunaan dana secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- g. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Sistem Proses pengelolaan harus dapat dievaluasi secara rutin untuk memastikan efektivitasnya. Proses ini harus melibatkan umpan balik dari semua pemangku kepentingan dan dilakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pencapaian tujuan pendidikan.

6. Langkah-langkah Operasional

Langkah-langkah operasional untuk menjalankan Model Hipotetik Proses pengelolaan Pendidikan dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tatakelola keuangan di Perguruan Tinggi Swasta Islam berlandaskan kearifan lokal adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Berbasis Kearifan Lokal 3 M (Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid): Langkah pertama adalah merumuskan kebijakan pembiayaan yang selaras dengan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. Kebijakan ini mencakup aspek perencanaan anggaran, pengalokasian dana, dan penggunaan sumber daya keuangan dengan tetap memperhatikan aspek moral dan etika dalam Islam serta budaya lokal yang berlaku.
- b. Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan: Perguruan tinggi perlu menyusun rencana anggaran tahunan yang rinci, transparan, dan akuntabel. Rencana anggaran ini harus mencakup pembiayaan untuk kegiatan operasional, pengembangan pendidikan, serta program-program yang mendukung kesejahteraan civitas akademika. Proses

perencanaan anggaran juga harus melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan di perguruan tinggi.

- c. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Keuangan (*Financial Management System*): Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pembiayaan berbasis teknologi yang dapat memantau, mengelola, dan melaporkan penggunaan dana secara real-time. Sistem ini harus mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, serta memudahkan pelaporan kepada pihak internal dan eksternal.
- d. Pelatihan SDM tentang Akuntabilitas: Melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, mulai dari tenaga administrasi hingga pengelola dana. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memahami prinsip-prinsip akuntabilitas, tata kelola yang baik, serta penerapan syariah dalam pengelolaan keuangan.
- e. Implementasi Pengawasan Internal dan Eksternal: Menetapkan sistem pengawasan yang melibatkan baik pengawasan internal (dari pihak perguruan tinggi) maupun eksternal (oleh lembaga audit independen atau regulator). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun, serta untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah.
- f. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan yang Transparan: Menyusun laporan keuangan yang jelas dan transparan, yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, orang tua, dan masyarakat. Laporan ini harus mencerminkan penggunaan dana secara akurat dan bertanggung jawab. Proses evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan dana dan untuk memastikan bahwa semua tujuan yang direncanakan tercapai.
- g. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Keterlibatan Stakeholder: Mendorong keterlibatan aktif seluruh stakeholder, seperti dosen,

mahasiswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembiayaan. Pendekatan partisipatif ini akan memperkuat akuntabilitas dan mendukung penerimaan serta dukungan terhadap pengelolaan keuangan yang berbasis syariah dan kearifan lokal.

- h. **Penyusunan dan Implementasi Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran:** Menyusun program-program yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran yang dibiayai dengan dana yang dikelola secara efisien dan akuntabel. Program ini harus mencakup pengembangan kurikulum, peningkatan fasilitas, dan pengembangan kompetensi SDM agar perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di pasar kerja.
- i. **Perbaikan dan Penyesuaian Berkelanjutan:** Melakukan perbaikan dan penyesuaian model Proses pengelolaan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dan feedback dari stakeholder. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga relevansi dan efektivitas pengelolaan keuangan serta memastikan bahwa prinsip kearifan lokal terus diterapkan dalam setiap aspek pengelolaan pendidikan.

7. Novelty Model

Kebaruan (Novelty atau kebaruan dari Model Hipotetik Proses pengelolaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Akuntabilitas Tatakelola Keuangan di Perguruan Tinggi Swasta Islam Berlandaskan Kearifan Lokal terletak pada beberapa aspek inovatif yang membedakan model ini dari praktik pengelolaan pembiayaan pendidikan yang ada. Berikut adalah beberapa aspek kebaruan dari model ini:

- a. **Integrasi Kearifan Lokal 3 M (*Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid*) dalam Pembiayaan:** Model ini menggabungkan dua elemen penting yang sering terabaikan dalam sistem manajemen pembiayaan perguruan tinggi, yaitu prinsip syariah dan kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya mengatur pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan norma yang

berlaku di masyarakat lokal, menciptakan sistem pembiayaan yang lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.

- b. Penerapan Sistem Keuangan Berbasis Teknologi yang Terintegrasi: Model ini mengusulkan penerapan sistem manajemen pembiayaan berbasis teknologi yang terintegrasi, yang memungkinkan pemantauan dana secara real-time dan transparan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pelaporan dan pengawasan keuangan.
- c. Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan: Salah satu kebaruan dari model ini adalah penerapan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan keuangan, yang melibatkan berbagai pihak, seperti dosen, mahasiswa, orang tua, dan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif stakeholder, model ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan transparan, di mana setiap keputusan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- d. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal yang Sinergis: Model ini menawarkan pendekatan baru dalam pengawasan keuangan dengan mengintegrasikan pengawasan internal dan eksternal secara lebih sinergis. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga audit independen, bersama dengan pengawasan internal yang ketat dari perguruan tinggi, memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik dalam aspek keuangan maupun prinsip syariah.
- e. Fokus pada Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Akuntabilitas Pembiayaan: Kebaruan lainnya adalah penekanan pada bagaimana pengelolaan pembiayaan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Model ini menilai bahwa efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan akan langsung berdampak pada pengembangan kurikulum, peningkatan fasilitas, dan pengembangan kompetensi dosen, yang pada akhirnya berkontribusi

pada peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi swasta Islam.

- f. Model Pembiayaan Berkelanjutan dengan Sumber Dana Internal dan Eksternal: Model ini menciptakan suatu sistem pembiayaan yang berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada dana dari pemerintah atau sumbangan eksternal, tetapi juga melibatkan sumber dana internal yang berasal dari kegiatan pendukung, seperti zakat, infak, dan wakaf. Ini menciptakan sumber daya yang lebih mandiri.
- g. Pengembangan Program Pembiayaan untuk Penguatan Karakter Islami dan Budaya Lokal: Model ini memperkenalkan program-program pembiayaan yang bertujuan untuk memperkuat karakter Islami mahasiswa serta melestarikan kearifan lokal melalui pendidikan. Program-program ini termasuk dalam bentuk pengembangan beasiswa berbasis syariah, pelatihan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa, dan dukungan terhadap kegiatan yang berorientasi pada nilai-nilai Islami dan budaya lokal.

8. Uji Kelayakan Model

Produk penelitian ini di uji dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD). Tujuannya adalah:

- 1) Mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap rancangan model.
- 2) Menilai relevansi, efektivitas, dan aplikabilitas model dalam konteks tata kelola keuangan PTS.
- 3) Mengidentifikasi potensi kelemahan model dan menentukan rekomendasi perbaikan sebelum implementasi.

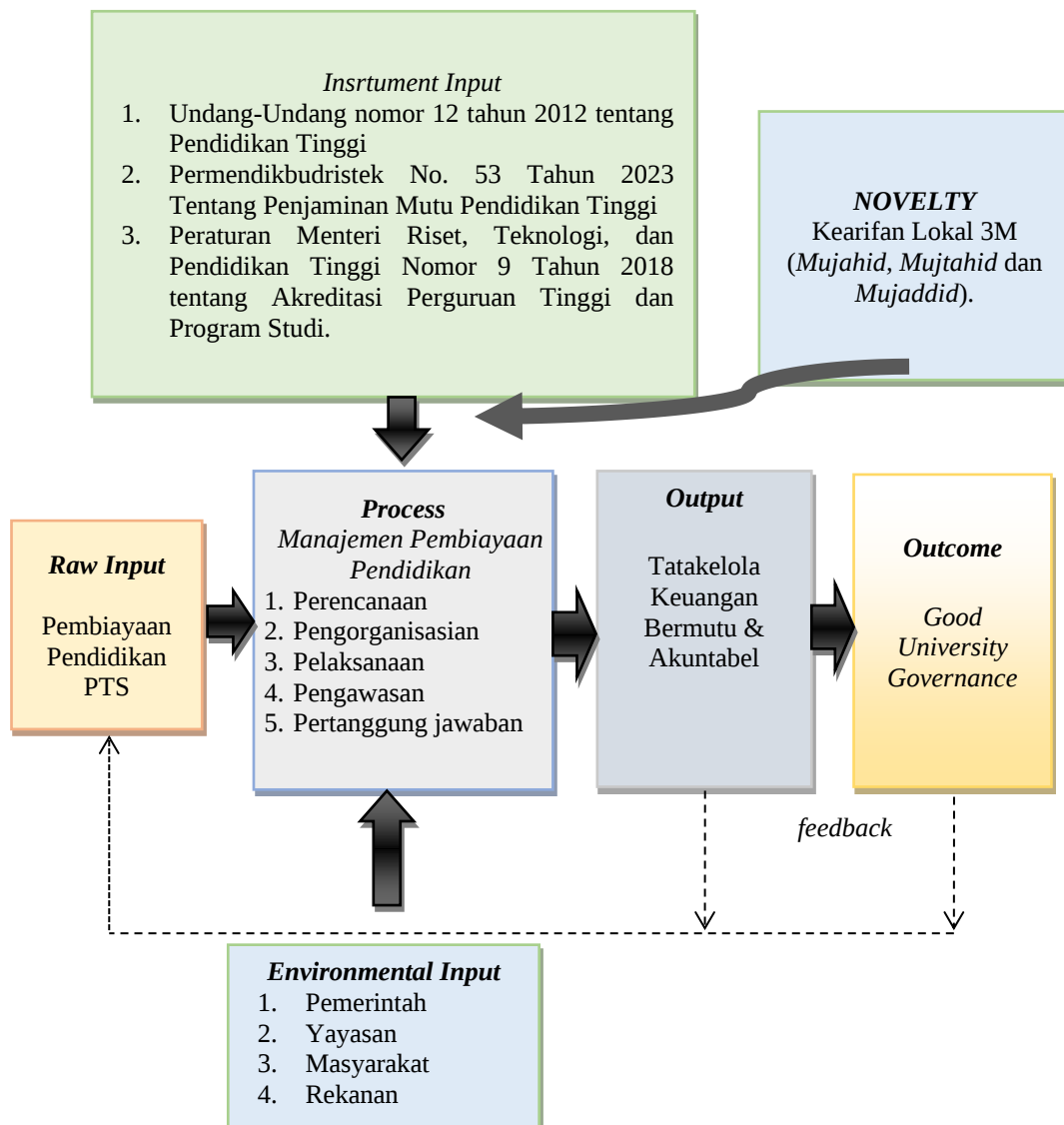
FGD melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan yang relevan, seperti:

- 1) Manajemen PTS: Rektor, wakil rektor bidang keuangan, kepala bagian keuangan.
- 2) Dosen dan Staf Administrasi: Pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana.
- 3) Mahasiswa dan Orang Tua: Sebagai penerima layanan dan kontributor

pendanaan.

- 4) Pihak Eksternal: Auditor, perwakilan pemerintah, dan ahli manajemen pembiayaan pendidikan.

9. Visualisasi Model



Gambar 5.1
Produk Penelitian

10. Keterangan Gambar

- 1) Raw Input: Elemen ini mewakili sumber daya utama yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan PTS, yaitu pembiayaan pendidikan. Pembiayaan ini berasal dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, yayasan, maupun mahasiswa.
- 2) Input Instrumental: Elemen ini mewakili berbagai peraturan, kebijakan, dan standar yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan PTS. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Peraturan-peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana keuangan PTS harus dikelola.
- 3) Proses: Elemen ini menggambarkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan PTS, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
- 4) Novelty: kebaruan dalam produk penelitian ini terletak pada kearifan local 3 M (*Mujahid, Mujtahid dan Mujaddid*) dalam proses Proses pengelolaan Pendidikan.
- 5) Output: Elemen ini merupakan hasil langsung dari proses pengelolaan keuangan yang dilakukan, yaitu Tatakelola Keuangan Bermutu & Akuntabel.
- 6) Outcome: Elemen ini merupakan dampak jangka panjang dari peningkatan mutu tata kelola keuangan, yaitu tercapainya *good university governance*.
- 7) Environmental Input: Elemen ini mewakili lingkungan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan PTS, seperti Pemerintah, Yayasan, Masyarakat dan Rekanan

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku:

- Abubakar, & Kurniatun, T. C. (2012). *Manajemen Pendidikan*. Alfabeta, CV.
- Alma, B. (2005). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Cetakan ke 5 (ed.)). Alfabeta, CV.
- Anwar, M. I. (2006). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori, Konsep dan Isu)*. Alfabeta, CV.
- Badrudin. (2020). *Pengembangan Model Proses pengelolaan Pesantren Berbasis Kewirausahaan Sosial Agribisnis Al Ittifaq Ciwidey Kabupaten Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara.
- Chairunnisa, C. (2016). *Manajemen Pendidikan Dalam Multi Perspektif*. Raja Grafindo Persada.
- Fatah, N. (2017). *Proses pengelolaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran* (N. N.M (ed.); Pertama). PT Remaja Rosdakarya.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Alfabeta, CV.
- Fatah, N. (2017). *Proses pengelolaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran* (N. N.M (ed.); Pertama). PT Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N. (2012). *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan* (Cetakan ke). PT Remadja Rosdakarya.
- Fattah, N. (2015). *Linisan Manajemen Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Gunawan, I. (2017). *Manajemen Pendidikan : Suatu Pengantar Praktik* (Cetakan 1). Alfabeta, CV.
- Hamalik, O. (2015). *Kurikulum dan Pembelajaran* (Ed. 1 Cet.). Bumi Aksara.
- Haris, A. (2020). *The Handbook Of Manajemen Pendidikan* (Kesatu). Alfabeta, CV.
- Hasibuan, M. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Hidayat, A., & Rusdiana, H. . (2022). *Proses pengelolaan Pendidikan : Konsep dan*

Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan (I). CV PUSTAKA SETIA.

Kemdikbud, D. K. dan K. D. D. (2014). *Good University Governance*. <https://Luk.Staff.Ugm.Ac.Id/Atur/Statuta/Latih/2014/03GoodUniversityGovernance.Pdf>.

KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.

Matin. (2017). *Proses pengelolaan Pendidikan : Konsep dan Aplikasinya* (N. Fuad (ed.); 2nd ed.). Rajali Pers.

Manullang, M. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen* (23rd ed.). UGM PRESS.

Muawanah, U., & Gajayana, U. (2021). *Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta*.

Muhaimin. (2015). *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Prenadamedia Group.

Mulyani, Y. M., Muawanah, U., & Ahmad. (2021). *Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta* (W. Kurniawan (ed.); 1st ed.). CV. PENA PERSADA.

Mulyasa, E. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2013). *Menjadi kepala sekolah profesional* (Cet.12). PT Remaja Rosdakarya.

Mulyono. (2009). *Manajemen Administrasi Pendidikan dan Organisasi Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.

P, F. W. (2013). *Pembiayaan Pendidikan : Suatu Kajian Teoritis*.

Refiana Said, L. (2020). *Buku Ajar Etika Bisnis* (Gcaindo (ed.); Cetakan Pe). Penerbit Lakeisha.

Sa'ud, U. S., & Makmun, A. S. (2009). *Perencanaan Pendidikan : Suatu Pendekatan Komprehensif* (Cet. 4). PT Remaja Rosdakarya.

Sanusi, A. (2017). *Sitem Nilai Alternatif Wajah-wajah Pendidikan* (Y. Iriantara (ed.); Cetakan II). Nuansa.

Siswanto. (2012). *Pengantar manajemen* (1st ed.). PT.Bumi Aksara.

Stoner, J. A. F., & Freeman, R. E. (1994). *Manajemen* (Ed. 5, cet). Intermedia.

- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (9th ed.). Alfabeta, CV.
- Suhardan, D. (2014). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Cet.2). Alfabeta, CV.
- Supriadi, D. (2010). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Cet.5). PT Remadja Rosdakarya.
- Suryosubroto. (2010). *Manajemen pendidikan di sekolah* (Revisi Cet). Rineka Cipta.
- T, H. H. (2003). *Manajemen*. Hoboken, NJ : Yogyakarta: BPFE,2003.
- Terry, G. ., & Rue, L. W. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen* (B. sari Fatmawat (ed.); Kedua). Bumi Aksara.
- UPI, T. D. A. P. (2020). *Manajemen Pendidikan* (Riduan (ed.); 10th ed.). Alfabeta, CV.
- Wijatno, S. (2009). *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, Dan Ekonomis*. Salemba Empat.
- Wijaya, C. (2017). *Perilaku Organisasi* (N. S. Chaniago (ed.); Cetakan Pe). Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).

Jurnal-Jurnal :

- Adzka, A. Analisis Proses pengelolaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lulusan. UIN Jakarta Repository, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id>. *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 10, no. 2, pp. 45-60.
- Aisyah, S. (2018). Perencanaan Dalam Pendidikan. *Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), hal. 730.
- Ali, S. T., Yang, Z., Sarwar, Z., & Ali, F. (2019). The impact of corporate governance on the cost of equity: Evidence from cement sector of Pakistan. *Asian Journal of Accounting Research*, 14(2), 139–171. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0062>
- Amaliah, N., Zulkarnain, S., & Hidayat, T. (2021). Akuntabilitas Keuangan Perguruan Tinggi Swasta: Studi Kasus di Universitas XYZ. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 123-135
- Andayani, R. (2020). Manejemen pembiayaan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(3), 45-58.
- Ariani, D. (2017). Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi. *Journal Pendidikan*, 3(1), 1–8.

- Atho'illah, A. Y. Penguatan Tata Kelola Transparansi Informasi Publik, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan di Perguruan Tinggi. UINSA Repository, 2021, <https://repository.uinsa.ac.id>. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pendidikan, vol. 6, no. 1, pp. 40-55.
- Clark, R. P. (2021). Financial Accountability in Public Universities. *Journal of Higher Education Finance*, 45(3), 245-259.
- Fitriani, M. (2019). Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi: Studi Kasus pada Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 15(2), 45-57.
- Gamar, N. (2019). Implementasi Proses pengelolaan Pendidikan (Study Kasus Mts Darul Khair Masing, Kec. Batui, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 11-20. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i1.1009>
- Hascaryani, I. Proses pengelolaan Pendidikan yang Efektif dalam Mencapai Tujuan Sekolah. IAIN Surakarta Repository, 2019, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id>. *Jurnal Pendidikan dan Keuangan*, vol. 7, no. 4, pp. 65-78.
- Hafnati, R. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan, Transparansi Laporan Keuangan, dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta. Universitas Andalas Repository, 2020, <https://scholar.unand.ac.id>. Jurnal Keuangan Publik, vol. 12, no. 2, pp. 89-103.
- Hill, L. C. (2020). Financial Management and Educational Governance in Developing Countries. *International Review of Education*, 66(2), 145-160.
- Iskinir, J. (2019). Implementasi Sistem Manajemen pembiayaan. *Idaarah*, 3(1), 114-123. <https://core.ac.uk/download/pdf/234752746.pdf>
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Proses pengelolaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1-18. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-01>
- Jones, P. A. (2019). Education Funding and its Impact on Quality Assurance in Universities. *Higher Education Policy*, 32(3), 289-303.
- Kaihatu, thomas S. (2006). Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), pp.1-9.
- Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Al-Afkar*, 6(1), 67-94.

- Prabowo, D., & Ningsih, F. (2022). Evaluasi Kinerja Keuangan Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(1), 22-35.
- Purnama, D. Evaluasi Sistem Pembiayaan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri. Universitas Pendidikan Indonesia Repository, 2023,. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, vol. 11, no. 4, pp. 78-94.
- Purnama, H., & Kurniawan, A. (2021). Evaluasi Proses pengelolaan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 14(1), 19-30.
- Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. In I. Wulansari (Ed.), *PT Norlive Kharisma Indonesia : Bandung ISBN: 978-602-73706-6-1 (Pertama)*. PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Martinez, A. M. (2021). Financial Planning and Governance in Higher Education Institutions. *Journal of Educational Administration*, 59(5), 623-638.
- Mulyono, P. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas tatakelola keuangan Pendidikan: Studi di Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Pendidikan dan Keuangan*, 10(1), 45-60.
- Mustofa, F. Optimalisasi Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Repository, 2022, <https://repository.uinjkt.ac.id>. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 55-70.
- Norton, W. T. (2020). The Impact of Financial Governance on the Quality of Education in Universities. *Journal of Financial Management in Education*, 38(1), 78-96.
- Nurdin, F., & Zuhdi, M. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mendukung Transparansi Keuangan Perguruan Tinggi. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 8(3), 89-100.
- Rachmawati, I. (2020). Perencanaan Anggaran Pendidikan dan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Pendidikan*, 8(1), 45-58.
- Rahayu, D., & Sulisty, A. (2019). Strategi Pengelolaan Keuangan untuk Keberlanjutan Institusi Pendidikan: Pendekatan Efisiensi dan Akuntabilitas. *Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi*, 7(4), 150-164.
- Santosa, B. Manejemen pembiayaan Perguruan Tinggi: Pengaruhnya terhadap Akuntabilitas dan Kualitas Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta

- Repository, 2019, <https://eprints.uny.ac.id>. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, vol. 15, no. 3, pp. 112-127.
- Sari, N. (2020). Proses pengelolaan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 9(2), 78-89.
- Santoso, B., & Dewi, P. (2019). Pengelolaan Keuangan di Perguruan Tinggi Swasta: Prosedur Pengeluaran dan Akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 11(4), 102-115.
- Santoso, B., & Dewi, P. (2020). Pelaporan Pengawasan Keuangan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 55-67.
- Shleifer Andrei and Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal Of Finance*, 52(2), 737-783.
- Shunhaji, A., N, A. M., & Desniati, P. (2020). Proses pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 18-39. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.82>
- Subakti, H., & Rosita, R. (2018). Pelaporan Keuangan Perguruan Tinggi dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi Pendidikan*, 10(2), 23-34.
- Suhartini, T. Peran Proses pengelolaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Jam'iyatul Khair Ciputat. UIN Jakarta Repository, 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id>. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 35-50.
- Supriyadi, S. (2019). Kebijakan Keuangan dan Pengelolaan Anggaran di Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Pendidikan*, 6(2), 89-103.
- Suryani, R. (2021). Audit dan Pengelolaan Keuangan Pendidikan: Perspektif Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Audit Keuangan Pendidikan*, 14(1), 34-48.
- Suyanto, S. (2021). Peran Pengelolaan Anggaran dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pengembangan*, 7(1), 55-70.
- Van der Meer, J. (2018). Financial Forecasting and Budgeting in Higher Education Institutions. *Journal of Educational Finance*, 43(2), 200-215.
- Walker, M. A. (2022). Improving Financial Accountability in Higher Education Institutions. *Educational Management & Leadership*, 50(4), 512-529.

Widiyanti, A. Proyeksi Akuntabilitas Keuangan serta Implikasinya terhadap Kinerja Perguruan Tinggi Swasta. Universitas Lampung Repository, 2022, <https://repository.lppm.unila.ac.id>. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, vol. 8, no. 3, pp. 120-135.

Widodo, I., & Hidayat, A. (2020). Sistem Pengendalian Keuangan pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Keuangan Pendidikan*, 8(4), 112-125.

Wijaya, H. Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Universitas Gadjah Mada Repository, 2021, <https://repository.ugm.ac.id>. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan Tinggi*, vol. 10, no. 2, pp. 99-115.

Link HTTPS:

Sambo, M. (2022). *Membenahi Kualitas Pendidikan Kita*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/opini/499935/membenahi-kualitas-pendidikan-kita>

RIWAYAT HIDUP



Nama Promovendus Promovendus, dilahirkan di Kota Bandung pada tanggal 16 Juni 1969, adalah putra ketiga dari lima bersaudara pasangan Bapak Yanis Marajo (Alm) dan Ibu Hj. Rosni (Alm). Pada tahun 1997, Promovendus menikah dengan Opi Sopiatin, S.H. dan saat ini tinggal di Komplek Griya Bandung Indah Blok i-1 No. 91 RT 08/11 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Jawa Barat.

Perjalanan pendidikan Promovendus dimulai di SDN Bojongloa V Bandung, yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1983. Kemudian, promovendus melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 10 Bandung dan lulus pada tahun 1986. Pada tahun 1989, Promovendus menyelesaikan pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 4 Bandung.

Setelah lulus dari SMA, Promovendus melanjutkan studinya di D3 Akuntansi PAAP Universitas Padjadjaran Bandung dan meraih gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md) pada tahun 1993. Semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri mendorongnya untuk kembali ke bangku kuliah pada tahun 2001 dan pada tahun 2003, ia berhasil meraih gelar Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2014, Promovendus mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Islam Bandung. Pada tahun 2018, Promovendus juga menyelesaikan pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Widyatama Bandung. Saat ini, Promovendus sedang menempuh pendidikan Doktorat Ilmu Pendidikan dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan di Universitas Islam Nusantara Bandung.

Setelah menyelesaikan studinya di PAAP Universitas Padjadjaran pada tahun 1993, Promovendus memulai karirnya di bidang akuntansi. Promovendus memiliki pengalaman yang luas sebagai staf akuntansi, kepala bagian akuntansi dan keuangan di berbagai perusahaan swasta di Kota Bandung dan Cirebon.

Pada tahun 2014, Promovendus bergabung dengan salah satu Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal. Selama berkarir sebagai auditor eksternal, ia

telah menangani berbagai penugasan baik di perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara/daerah.

Selain berkarir di bidang akuntansi, Promovendus juga memiliki minat dalam dunia pendidikan. Pada tahun 2015, Promovendus memulai karirnya sebagai Dosen Akuntansi di perguruan tinggi swasta. Sejak tahun 2021, Promovendus menjadi Dosen Tetap Prodi Akuntansi di Universitas Teknologi Digital. Selain mengajar, sejak tahun 2020 hingga sekarang, Promovendus juga bekerja di Biro Perencanaan, Keuangan dan Aset Universitas Islam Nusantara, dengan tugas di bagian Akuntansi.

Promovendus adalah anggota utama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wilayah Jawa Barat sejak tahun 2015. Promovendus juga terdaftar di Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai Akuntan dengan nomor Register Negara Akuntan 1617. Selain itu, Promovendus memiliki sertifikat Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Selain aktif dalam bidang akuntansi dan pendidikan, Promovendus juga berkontribusi dalam dunia literasi. Bersama teman-teman mahasiswa Kelas A Sekolah Pascasarjana S3 Ilmu Pendidikan angkatan 29, Promovendus ikut serta dalam pembuatan book chapter “ Bunga Rampai Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah dan Tinggi”. Karya tulis ini menjadi bukti dedikasi Promovendus dalam mengembangkan keilmuan dan berbagi pengetahuan dengan masyarakat.

Demikian riwayat hidup Promovendus, seorang profesional di bidang akuntansi dan pendidikan yang berdedikasi untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan berkontribusi bagi masyarakat.

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana



UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Soekarno – Hatta No. 530 Bandung 40286 Telp./Faks. +6222 7509656
<http://sps.uninus.ac.id>, E-mail: pasca@uninus.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
Nomor: 014/UNINUS-SPs.D/SK/2022
tentang
PENUNJUKAN TIM PROMOTOR DISERTASI
MAHASISWA SEKOLAH PASCASARJANA
TAHUN AKADEMIK GENAP 2021/2022**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Disertasi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tinggi pada Program Doktor (Strata III);
2. Bahwa Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa dengan bimbingan dan arahan dari Tim Promotor yang terdiri atas Promotor, Ko-Promotor, dan Anggota berdasarkan kaidah dan SOP Penulisan Disertasi;
3. Bahwa dalam upaya penyusunan Disertasi diperlukan Tim Promotor yang profesional dan memiliki kompetensi yang relevan dengan topik permasalahan sehingga Disertasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Standar Prosedur Operasional Sekolah Pascasarjana tentang Pengajuan dan Pembimbingan Disertasi;
2. Usulan pengajuan Tim Promotor oleh Dewan Pembimbingan Disertasi di lingkungan Sekolah Pascasarjana.
- MENETAPKAN
PERTAMA** : Tentang Penunjukan Tim Promotor Disertasi
- : Mengangkat dan menetapkan nama di bawah ini:
1. Prof. Dr. Iim Wasliman, M.Pd., M.Si.
2. Dr. Waska Warta, M.M.
3. Dr. Yoyok Prasetyo, ST., M.Sy.
- Untuk membimbing penyusunan Disertasi mahasiswa di bawah ini
- Nama : Heriyanto
- NIS : 41038104200050
- Jenjang/Program Studi : Strata III/ Ilmu Pendidikan
- Judul Disertasi : *Implementasi Sistem Informasi Keuangan dalam Meningkatkan Tata Kelola Keuangan*
- KEDUA** : Tugas pembimbingan mencakup: (1) pembimbingan Disertasi, (2) pembuatan artikel ilmiah internasional bereputasi dan abstraknya dalam bahasa Inggris.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) semester terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 06 Agustus 2022
Direktur,



Prof. Dr. H. Iim Wasliman, M.Pd., M.Si.
NHDK 8831923420

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan;
2. Tim Promotor sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembimbingan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembimbingan;
4. Arsip.

2. Surat Keterangan Penelitian

 unisba UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG	Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40114 Telp. 022 4203348 (PULUTING) Fax. 022 4243895 www.unisba.ac.id kantor@unisba.ac.id	 UNGGUL Kampus	 ASIC N.1.812.0123 2009-2023
---	---	--	---

Nomor : 832/H.13/Rek-k/VIII/2023
Lampiran :-
Perihal : **Izin Penelitian Sdr. Heriyanto**

24 Agustus 2023 M
06 Muharram 1445 H

Kepada Yth.
**Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Nusantara
Jl. Soekarno Hatta No. 530 Bandung**

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Teriring do'a semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga aktivitas yang kita jalani dalam keseharian memiliki nilai ibadah. *Âmin.*

Membalas surat Bapak Nomor: 763/UNINUS/SPs/PT/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini Kami memberikan Izin kepada:

Nama	: Heriyanto
NIM	: 41038104200050
Program Studi	: S3 Ilmu Pendidikan
Konsentrasi	: Manajemen Pendidikan
Tahun Akademik	: 2022/2023

Untuk melaksanakan penelitian di Unisba dalam rangka penyusunan Disertasi dengan judul : "Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel". Meskipun demikian, Kami mohon diinfokan data seperti apa yang dibutuhkan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Atih R. Dariah, SE., M.Si

3. Data Hasil Wawancara

No	Jawaban Hasil Wawancara
Perencanaan (A dan B)	
1	Proses Penentuan Anggaran di Universitas Islam Bandung menggunakan Mix Method, yakni penyusunan anggaran dimulai dari top management dengan memberikan arahan-arahan khusus dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh Unit, Bagian, Lembaga dan Fakultas. Anggaran kegiatan yang diajukan oleh Unit, Bagian, Lembaga dan Fakultas akan melewati tahapan screening kesesuaian sinkronisasi isu-isu strategis, alternatif tema, dan program prioritas.
2	Pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembiayaan yaitu seluruh stakeholder mulai dari Unit, Bagian, Lembaga, Fakultas, Pemangku Keputusan (Rektor, Para Wakil Rektor dan Senat) serta Badan Pengurus Yayasan.
3	Segala aspek yang menjadi faktor tercapainya Visi dan Misi Unisba akan menjadi prioritas utama kegiatan untuk dilaksanakan. Untuk mencapai misi Unisba Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia Pada Tahun 2033 maka fokus kegiatan ialah internasionalisasi.
4	Kebijakan perencanaan harus dihitung sedemikian rupa dengan mempertimbangkan stabilitas jumlah mahasiswa aktif, sumber dana lainnya dan rencana belanja seluruh kegiatan universitas. Rencana belanja dapat diketahui dan diakses (melalui sistem SIARAN) oleh jajaran pimpinan sebagai implementasi terlaksanannya transparansi.
5	Hal yang dilakukan untuk menjamin stabilitas dan diversifikasi sumber pendanaan ialah melalui proses komersialisasi melalui peningkatan tata kelola untuk unit yang berpotensi sebagai income generating, membangun jejaring internasional dalam memperoleh hibah luar negeri, dan memfasilitasi pengembangan laboratorium dalam memberikan pelayanan eksternal.
Pengorganisasian (A dan B)	

No	Jawaban Hasil Wawancara
1	Struktur organisasi diatur dalam Statuta. Adapun peran staf keuangan dalam pengelolaan dana pendidikan sesuai tupoksi yakni memastikan kegiatan yang terlaksana beserta laporan pertanggungjawaban sesuai dengan kinerja dan penetapan Badan Pengurus Yayasan.
2	Latar belakang pendidikan Staf Keuangan Unisba ialah Strata 1 Akuntansi. Adapun pelatihan staf terorganisir di Bagian Pengembangan SDM dan Umum biasanya melakukan pelatihan dan sertifikasi Microsoft, service excellent serta pelatihan eksternal seperti perpajakan dan pelaporan keuangan.
3	Tugas dan Wewenang Staf Keuangan Universitas terbagi menjadi 3 Bagian. Pertama bagian Anggaran, Kedua bagian Pencairan dan Ketiga bagian Pelaporan Keuangan.
4	Teknologi informasi digunakan untuk mengefisiensikan kinerja, menyajikan informasi secara akurat dan riil time. Unisba membangun Sistem yang terintegrasi yakni SIARAN yang mengelola proses penganggaran sampai pelaporan keuangan bisa diakses kapan saja dan dimana saja untuk memudahkan rangkaian pelaporan Keuangan.
5	Mekanisme pengorganisasian dan pengambilan keputusan keuangan terbuka dan transparan menjadi prerogatif top manajemen.
6	Inovasi dan perubahan baru dalam pengorganisasian yang telah diterapkan ialah roadshow untuk mengurangi permasalahan ketercapaian BDM. Selama ini yang baru dijalankan sebatas memberikan surat pemberitahuan saja.
Pelaksanaan (C dan D)	
1	Pengeluaran dana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan (sesuai SK Penetapan Rencana Kerja dan Belanja). Sejauh mana tingkat kesesuaian dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat setiap akhir Februari dan Agustus tiap tahun anggaran.

No	Jawaban Hasil Wawancara
2	Untuk memastikan efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan dilakukan pada tahap pemeriksaan LPJ apakah realisasi pelaksanaannya sesuai dengan ajuan awal anggaran
3	Dana pendidikan dipastikan dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan hal ini ditunjukkan dengan besaran anggaran belanja terfokus pada kegiatan Tri Dharma, khususnya Bidang Dikjar, Penjaminan Mutu dan Akreditasi
4	Unisba melakukan pengendalian internal secara berkala melalui bagian Badan Pengawas (BP) yang melakukan kontrol atas kegiatan yang dilaksanakan Universitas. Selain itu dilakukan audit mutu internal oleh Badan Pengawas Mutu (BPM).
5	Untuk saat ini masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana pendidikan, namun orang tua mahasiswa yang tergabung dalam IKOMAH (Ikatan Orangtua Mahasiswa) dapat melakukan konfirmasi perihal penggunaan dana pendidikan.
Pengendalian/Pengawasan	
1	Audit internal dilakukan oleh bagian BP (Badan Pengawas) Yayasan untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan akuntabilitas keuangan. Selain itu pula, audit mutu internal dilakukan oleh BPM (Badan Penjamin Mutu). Prosesnya melalui serangkaian kegiatan kunjungan untuk menunjukkan proses dan bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan di Unisba.
2	Audit internal dilakukan oleh bagian BP (Badan Pengawas) Yayasan untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan akuntabilitas keuangan. Selain itu pula, audit mutu internal dilakukan oleh BPM (Badan Penjamin Mutu). Prosesnya melalui serangkaian kegiatan kunjungan untuk menunjukkan proses dan bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan di Unisba.
3	Unisba juga melakukan proses audit oleh eksternal yakni oleh Kantor Akuntan Publik Bambang Sudaryono dan Rekan. Hasilnya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

No	Jawaban Hasil Wawancara
4	Dewan Pengawas melakukan monitoring berkala melalui bagian Badan Pengawas yang melakukan kontrol atas kegiatan yang dilaksanakan Universitas. Selain itu Dewan Pengawas juga melakukan Audit Eksternal oleh KAP.
5	Transparansi keuangan Laporan Keuangan dapat diakses pada laman Unisba.ac.id (sebatas pada Laporan Tahunan Rektor - Bidang Keuangan)
6	Rekomendasi dari Dewan Pengawas akan selalu diimplementasikan dalam praktek pengelolaan keuangan guna perbaikan kinerja keuangan. Sampai saat ini bukti pelaksanaan hanya sebatas nominal yang tertera pada Laporan Keuangan, kedepannya akan ditambahkan bukti BAP atau notulensi pelaksanaan rekomendasi Dewan Pengawas.
Pertanggungjawaban	
1	Proses Pelaporan Keuangan di Unisba diawali prosesajuan anggaran, lalu pencairan dananya, dan pencatatan voucher sampai penjurnalan. Setelah di jurnal, dapat dilakukan proses pembuatan laporan keuangan dan Rekonsiliasi. Yang bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan ialah Kasie. Pelaporan Keuangan dan Kepala Bagian Keuangan.
2	Transparansi keuangan Laporan Keuangan dapat diakses pada laman Unisba.ac.id (sebatas pada Laporan Tahunan Rektor - Bidang Keuangan)
3	Pelaporan Keuangan Unisba berdasarkan PSAK 45 Akuntansi Nirlaba berubah mejadi ISAK 35 Laporan Keuangan Organisasi yang Berorientasi Non Laba. Hal ini dipastikan dibawah pantauan BP (Badan Pengawas) Yayasan.
4	Unisba melakukan Analisis Dana Operasional Pendidikan sebagai evaluasi dan pemantauan kinerja keuangan dalam pengelolaan dana pendidikan. Analisis Dana Operasional Pendidikan ini juga sebagai acuan penentuan tarif mahasiswa baru.
5	Adapun pihak yang terlibat dalam proses pertanggungjawaban ialah Unit dan atau Fakultas serta bagian Keuangan yang memastikan laporan pertanggungjawaban tersebut ialah benar sesuai dengan pedoman keuangan

No	Jawaban Hasil Wawancara
	yang berlaku. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka akan dilibatkan BP (Badan Pengawas) Yayasan guna meluruskan kembali proses tersebut.
6	Temuan dan Rekomendasi dari proses pertanggungjawaban akan selalu diimplementasikan sesuai dengan Pedoman Keuangan yang berlaku.
Hambatan	
1	Regulasi dan kebijakan Unisba saat ini mendukung untuk terlaksananya pengelolaan dana pendidikan yang akuntabel.
2	Sumber pendanaan Unisba masih cukup tinggi berasal dari Mahasiswa, sehingga menjadi tantangan untuk mendapatkan sumber penerimaan di luar Mahasiswa. Keterbatasan tersebut mengurangi mutu Unisba dalam menghasilkan penerimaan income generating.
3	Budaya organisasi didalam internal Unisba dibangun agar dapat terlaksana dengan islami, dengan mewajibkan penggunaan busana muslim, pengajian rutin bulanan, Kawasan Bebas asap rokok, mewajibkan shalat berjamaah, serta membiasakan puasa sunnah. Namun dalam praktiknya masih terkendala, belum seluruh pegawai melaksanakannya.
4	Secara teroris pengambilan keputusan yang tidak jelas maka akan menghambat dalam perencanaan dan pelaksanaan keuangan yang efektif.
5	Kurangnya kapasitas dan keterampilan staf dalam mengelola keuangan akan menjadi faktor penghambat dalam terlaksananya keuangan yang efektif. Maka dari itu Unisba berusaha untuk selalu menempatkan SDM sesuai dengan bidang dan background pendidikan, serta mempersiapkan pelatihan agar menunjang SDM sesuai kebutuhan organisasi.
6	Ketidak transparan dan pengawasan yang lemah dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan.
Solusi Atas Hambatan	
1	Kebijakan dan regulasi merupakan hak prerogatif Top Manajemen. Baik kebijakan maupun regulasi akan berubah sesuai kebutuhan organisasi, kesesuaian sinkronisasi isu-isu strategis, alternatif tema, dan program prioritas.

No	Jawaban Hasil Wawancara
2	Upaya untuk meningkatkan sumber daya keuangan ialah dengan melalui proses komersialisasi melalui peningkatan tata kelola untuk unit yang berpotensi sebagai income generating, membangun jejaring internasional dalam memperoleh hibah luar negeri, dan memfasilitasi pengembangan laboratorium dalam memberikan pelayanan eksternal.
3	Budaya organisasi sangat perlu untuk ditingkatkan guna tercapainya Visi dan Misi Unisba serta meningkatkan tata kelola keuangan. Perlu menanamkan kesadaran budaya organisasi seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin, berintegrasi, serta bekerja secara Daya guna dan hasil guna.
4	Proses pengambilan keputusan dibuat secara hati-hati dan melihat bagaimana kebutuhan dan kondisi organisasi. Pengambilan keputusan secara matang menjadi tanggung jawab top manajemen.
5	Bagian Pengembangan SDM dan Umum telah merancang kegiatan pelatihan dan pengembangan karir tendik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Khusus untuk bidang keuangan akan dilakukan pelatihan agar mengupgrade skill seperti pelatihan excel, perpajakan dan pelaporan keuangan khusus untuk Perguruan Tinggi. Selain itu unisba juga menyediakan beasiswa bagi Tendik yang ingin melanjutkan studi.
6	Langkah yang diambil Unisba dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan ialah dengan menjalankan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Keuangan, mengikuti guideline dari hasil pemeriksaan internal (SPMI) baik dari BPM maupun Badan Pengawas Yayasan. Unisba juga mengikuti masukan dan arahan saran perbaikan dari Auditor Eksternal.

4. Data Hasil Observasi

No	Aspek Yang Diamati	Indikator	Keterangan
1	Rapat Perencanaan	Kehadiran dan Partisipasi Stakeholder	Ada
2	Dokumen Perencanaan	Kejelasan dan Keterperincian Rencana Anggaran	Ada
3	Proses Pengambilan Keputusan	Mekanisme Diskusi dan Konsensus	Ada
4	Sinkronisasi dengan Visi dan Misi	Relevansi Perencanaan dengan Tujuan Strategis	Ada
5	Metode Estimasi Biaya	Penggunaan Data dan Metode dalam Estimasi	Ada
6	Struktur Organisasi	Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab	Ada
7	Koordinasi Antar Unit	Interaksi dan Kolaborasi Antara Unit	Ada
8	Sumber Daya Manusia	Kompetensi dan Keterampilan Personel	Ada
9	Penggunaan Teknologi	Implementasi Sistem Manejemen pembiayaan	Ada
10	Efektivitas Prosedur Internal	Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur	Ada
11	Realisasi Anggaran	Penyimpangan dari Rencana Anggaran	Ada
12	Proses Pengelolaan Dana	Penggunaan dan Pengalokasian Dana	Ada
13	Kepatuhan terhadap Prosedur	Proses Pengeluaran dan Pelaporan Dana	Ada
14	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Frekuensi dan Kualitas Evaluasi	Ada
15	Transparansi dalam Pelaksanaan	Keterbukaan Informasi Keuangan	Ada
16	Pelaksanaan Audit Internal	Proses dan Temuan Audit	Ada
17	Sistem Pengendalian Internal	Efektivitas Pengendalian dan Pencegahan Risiko	Ada
18	Pemantauan Kinerja Keuangan	Pelaksanaan dan Dokumentasi Pemantauan	Ada
19	Kepatuhan terhadap Regulasi	Kesesuaian dengan Peraturan Eksternal dan Internal	Ada
20	Pelaporan Pengawasan	Kualitas dan Ketepatan Pelaporan Pengawasan	Ada
21	Penyusunan Laporan Keuangan	Kelengkapan dan Ketepatan Laporan	Ada
22	Akuntabilitas Publik	Transparansi dalam Pelaporan	Ada
23	Evaluasi Kinerja Keuangan	Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi dalam Pengelolaan Dana	Ada
24	Respons terhadap Feedback Stakeholder	Proses Tindak Lanjut Feedback	Ada
25	Implementasi Rekomendasi Audit	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	Ada

5. Data Hasil Studi Dokumentasi

No	Aspek	Dokumen Yang Diperiksa	Keterangan
1	Perencanaan	• Rencana Strategis • Anggaran Tahunan • Rencana Pengembangan Institusi	• Oke • Oke • Oke
2	Pengorganisasian	• Struktur Organisasi • Deskripsi Tugas • SOP Keuangan	• Oke • Oke • Oke
3	Pelaksanaan	• Laporan realisasi anggaran • Laporan penggunaan dana • Kontrak terkait pembiayaan	• Oke • Oke • Oke
4	Pengawasan	• Laporan audit internal • Laporan hasil pengawasan • Catatan evaluasi keuangan	• Oke • Oke • Oke
5	Pertanggungjawaban	• Laporan keuangan tahunan • Laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder • Laporan evaluasi kinerja keuangan	• Oke • Oke • Oke

6. Dokumentasi Kegiatan Penelitian







